



UNIVERSITAS INDONESIA

**KONVERGENSI HUKUM TELEKOMUNIKASI DAN
PENYIARAN DALAM PENYELENGGARAAN
INTERNET PROTOCOL TELEVISION**

TESIS

**NAMA : TEGUH HERU MARTONO
NPM : 0706176265**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**JAKARTA
JANUARI 2010**



UNIVERSITAS INDONESIA

**KONVERGENSI HUKUM TELEKOMUNIKASI DAN
PENYIARAN DALAM PENYELENGGARAAN
INTERNET PROTOCOL TELEVISION**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu
Hukum**

**NAMA : TEGUH HERU MARTONO
NPM : 0706176265**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**JAKARTA
JANUARI 2010**

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : TEGUH HERU MARTONO
NPM : 0706176265
Program Studi : MAGISTER ILMU HUKUM
Judul Tesis : KONVERGENSI HUKUM TELEKOMUNIKASI DAN
PENYIARAN DALAM PENYELENGGARAAN
INTERNET PROTOCOL TELEVISION

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. EDMON MAKARIM S. Kom, S.H., LL.M


Penguji : ANDRI GUNAWAN WIBISANA S.H., LL.M, Ph. D

Penguji : Dr. FREDY HARRIS S.H., LL.M

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 6 Januari 2010

KATA PENGANTAR/UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas segala karunia, berkat dan rahmat serta hidayah yang diberikanNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Ilmu Hukum Universitas Indonesia. Meskipun penulis telah berupaya semaksimal mungkin untuk menyelesaikan tesis ini, namun penulis menyadari sepenuhnya, bahwa tesis ini masih belum sempurna. Selaku insan ciptaan Allah SWT wajib hukumnya berikhtiar dan melakukan sebaik mungkin, namun kesempurnaan tetap hanya milik Tuhan Yang Maha Kuasa . Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan masukan atau saran dari Bapak/Ibu sekalian untuk penyempurnaan tesis ini.

Bersama ini, perkenankan penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang tak terhingga atas segala bantuan, perhatian, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak, sehingga tesis ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Terima kasih yang tak terhingga, penulis sampaikan kepada para dosen penguji dan juga segenap anggota tim penguji; (i) Dr. Edmon Makarim, S.Kom., SH, LL.M, selaku pembimbing sekaligus dosen Program Magister Ilmu Hukum yang telah berkenan meluangkan waktu ditengah jadwal yang begitu padat; (ii) Andri Gunawan Wibisana SH, LL.M. Ph.D, selaku penguji yang telah memberikan perhatian dan dukungan serta arahan bagi penulis; (iii) Dr. Fredy Harris S.H., LL.M selaku penguji yang telah memberikan perhatian dan dukungan serta arahan bagi penulis.

Terima kasih juga tak lupa penulis sampaikan kepada segenap jajaran pimpinan Fakultas; Prof. Safri Nugraha, SH, LL.M, PhD, selaku Dekan Fakultas Hukum, Dr. Siti Hajati Hossein selaku Wakil Dekan, para dosen Fakultas Hukum Program Magister Ilmu Hukum serta segenap karyawan dan civitas akademika FHUI

yang telah banyak memberikan perhatian dan dukungan kepada penulis untuk selalu memotivasi dalam menyelesaikan program pendidikan ini sebaik mungkin.

Kepada rekan-rekan Angkatan 2007 Program Magister Ilmu Hukum FHUI, Viktor, Teguh Arifiyadi, Bimo, Ma'ruf, Rizki, Basuki Suryanto, Yanti, Herlin, Ingga, Novita, Tetty dan teman-teman seangkatan lainnya yang tak mungkin saya tuliskan satu persatu; terima kasih saya ucapkan karena telah memberikan motivasi serta semangat untuk menyelesaikan penulisan tesis ini.

Terima kasih kepada rekan-rekan di Unit Regulatory Management PT. TELKOM, Widi, Joko Aswanto, Ridwan, Andi Agus Akbar, Arief Hamdani Gunawan, Karlos Siahaan, Ridwan Zein, Riduar, Doddy Hertanto, Purwo Ariandono, Slamet Saputro, Muhammad Luth Nur, Muryani, Fenny, serta Pak Herdy Harman selaku Vice President Regulatory Management karena telah memberikan dorongan semangat kepada penulis agar dapat segera menyelesaikan tesis ini.

Khusus kepada yang tercinta dan tersayang istriku Diana Fortunata, ananda Herdianto Naufal Farras dan Varian Fawwaz yang telah memberikan dukungan baik moril maupun spirituil serta dorongan semangat agar secepatnya dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.

Akhirul kata, penulis berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu dan terima kasih juga penulis ucapkan kepada pihak-pihak yang mungkin terlalaikan disebutkan dalam halaman ini, namun sumbangsih serta perhatian Bapak/Ibu dan saudara serta rekan-rekan sekalian sesungguhnya tak terlupakan. Besar harapan penulis, semoga tesis ini memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu dan bagi kita semua. Tesis ini baru awal bagi satu langkah besar untuk mengembangkan layanan IPTV di Indonesia yang memadukan bidang telekomunikasi, media, penyiaran serta telematika.

Jakarta, 6 Januari 2010

Penulis

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademika Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TEGUH HERU MARTONO
NPM : 0706176265
Program Studi : MAGISTER ILMU HUKUM
Departemen : ILMU SOSIAL
Fakultas : ILMU HUKUM
Jenis karya : TESIS

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Rights) atas tesis (karya ilmiah) saya yang berjudul :

**KONVERGENSI HUKUM TELEKOMUNIKASI DAN
PENYIARAN DALAM PENYELENGGARAAN INTERNET
PROTOCOL TELEVISION**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 6 Januari 2010

Yang menyatakan,

(Teguh Heru Martono)

ABSTRAK

Nama : TEGUH HERU MARTONO
Program Studi : MAGISTER ILMU HUKUM
Judul : KONVERGENSI HUKUM TELEKOMUNIKASI DAN
PENYIARAN DALAM PENYELENGGARAAN
INTERNET PROTOCOL TELEVISION

Tesis ini membahas tentang konvergensi regulasi telekomunikasi dan regulasi penyiaran terhadap penyelenggaraan IPTV serta korelasi kajian regulasi layanan IPTV terhadap peraturan perundang-undangan terkait lainnya yang berlaku di Indonesia yang bertujuan adanya kepastian hukum bagi pelaku bisnis dalam menyelenggarakan layanan IPTV, dan bagi konsumen/pelanggan untuk menikmati layanan IPTV secara aman, terlindungi dan berkualitas. Penelitian hukum dalam tesis ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan menganalisis kaedah-kaedah hukum dalam aturan perundang-undangan yang terkait, penelitian eksploratoris dengan mengetahui sejumlah hal yang berkaitan dengan konvergensi IPTV baik dalam lingkungan nasional maupun internasional, penelitian deskriptif yang memaparkan hasil eksplorasi informasi yang menggambarkan hal-hal yang relevan dengan tujuan penelitian serta mengadakan *Focus Group Discussion* (FGD) secara bertahap yang melibatkan regulator, pelaku usaha, penyedia teknologi dan pengguna. Dalam penyelenggaraan IPTV di Indonesia harus mematuhi ketentuan Peraturan Menteri KOMINFO No. 30 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Layanan Televisi Protokol Internet (*Internet Protocol Television/IPTV*) di Indonesia yang dilakukan tinjauan analisis dari sudut pandang hukum persaingan usaha, hukum perlindungan konsumen, hukum hak cipta dan hukum transaksi elektronik dengan kesimpulan penyelenggara IPTV di Indonesia dapat menyelenggarakan layanan IPTV apabila telah memiliki izin penyelenggaraan Jasa Akses Internet (ISP), Jaringan Tetap Lokal berbasis *Packet Switched* dan Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB) serta perlu dilakukan revisi terhadap beberapa ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri KOMINFO No. 30 tahun 2009 dengan memasukkan unsur-unsur sesuai ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam UU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, UU Perlindungan Konsumen, UU HAKI, UU Pornografi, UU Perfilman, UU ITE dan Cybercrime.

Kata kunci : IPTV, konvergensi, layanan IPTV, TV Analog, TV Digital, *Focus Group Discussion*, Peraturan Menteri Nomor 30 tahun 2009, hukum persaingan usaha, perlindungan konsumen, Hak Cipta, Transaksi Elektronik, Pornografi, Perfilman, *Cybercrime*, regulasi IPTV di negara lain di dunia, regulasi IPTV di Indonesia.

ABSTRACT

Name : TEGUH HERU MARTONO
Study Program : SCIENCE IN THE LAW
Title : CONVERGENCE TELECOMMUNICATIONS AND
BROADCASTING LAW IN IMPLEMENTATION OF
INTERNET PROTOCOL TELEVISION

This thesis discusses the convergence of telecommunications regulation and the regulation of broadcasting of the implementation of IPTV and correlation study of the IPTV service regulation laws and regulations related applicable in Indonesia, which aims for legal certainty in the conduct of business IPTV services, and for consumers / customers to enjoy IPTV services are safe, protected and quality. Legal research in this thesis using normative legal research by analyzing the legal rules in laws and regulations related, research eksploratoris by knowing a number of things related to the convergence of IPTV in both national and international environment, descriptive study that describes the results of the exploration information that describes things that are relevant to the research objectives and a Focus Group Discussion (FGD) which involves gradually regulators, business, technology providers and users. In the implementation of IPTV in Indonesia must comply with the provisions of Regulation Minister KOMINFO No. 30 year 2009 about implementation of IPTV Services (Internet Protocol Television / IPTV) in Indonesia is carried out a review of analysis from the perspective of competition law, consumer protection law, copyright law and the law of electronic transactions with the conclusion IPTV provider in Indonesia may carry IPTV services if the organization has licensed Internet Access Service (ISP), Network-based Local Fixed Packet Switched and Non-Subscription Broadcasting (LPB) and the necessary revisions to certain provisions contained in the Ministerial Regulation No. KOMINFO. 30 in 2009 to include appropriate elements of the provisions contained in the Act on the Prohibition of Unfair Business Competition, Consumer Protection Law, Intellectual Property Law, Law on Pornography, Film Act, ITE and Cybercrime Act.

Keywords: IPTV, convergence, IPTV services, Analog TV, Digital TV, Focus Group Discussion, Regulation of the Minister No. 30 of 2009, competition law, consumer protection, Copyright, Electronic Transactions, Pornography, Film, Cybercrime, regulation of IPTV in the country else in the world, IPTV regulation in Indonesia.

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| LEMBAR PENGESAHAN | ii |
| KATA PENGANTAR | iii |
| LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH | v |
| ABSTRAK | vi |
| DAFTAR ISI | viii |
| DAFTAR GAMBAR | xii |
| DAFTAR TABEL | xiii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xiv |
| | |
| BAB 1 PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 LATAR BELAKANG | 1 |
| 2.1 POKOK PERMASALAHAN | 8 |
| 3.1 MAKSUD DAN TUJUAN | 8 |
| 4.1 RUANG LINGKUP | 9 |
| 5.1 KERANGKA TEORITIS | 10 |
| 6.1 KERANGKA KONSEPSIONAL | 11 |
| 7.1 METODE PENELITIAN | 15 |
| 8.1 SISTIMATIKA PENULISAN | 16 |
| | |
| BAB 2 KONVERGENSI REGULASI TELEKOMUNIKASI DAN PENYIARAN TERHADAP PENYELENGGARAAN IPTV SEBAGAI TV MASA DEPAN | 18 |
| 2.1 KONSEP IPTV | 18 |
| 2.1.1. Perbedaan antara TV Analog dan TV Digital | 19 |
| 2.1.2. Perbedaan antara Internet TV dan IPTV | 22 |
| 2.1.3. Implementasi IPTV | 24 |
| | |
| 2.2 SISTEM IPTV | 26 |
| 2.2.1. <i>Content Sources</i> | 34 |
| 2.2.2. <i>Service Nodes</i> | 34 |
| 2.2.3. <i>Customer Access Links</i> | 35 |
| 2.2.4. <i>Customer Premises Equipment (CPE)</i> | 35 |
| 2.2.5. <i>IPTV Client</i> | 35 |
| 2.2.6. <i>Arsitektur IPTV</i> | 35 |
| 2.2.6.1. <i>Content Operation Function Set</i> | 36 |
| 2.2.6.2. <i>System Management and Security Function Set ...</i> | 36 |
| 2.2.6.3. <i>System Operation and Management Function Set</i> | 37 |
| 2.2.6.4. <i>Media Distribution and Delivery Function Set ...</i> | 37 |
| 2.2.6.5. <i>Customer Function Set</i> | 37 |

| | | |
|-------|---|----|
| 2.3 | JENIS-JENIS LAYANAN IPTV | 37 |
| | 2.3.1. <i>Electronic Program Guide</i> | 38 |
| | 2.3.2. <i>Broadcast/Live TV</i> | 39 |
| | 2.3.3. <i>Personal Video Recording</i> | 39 |
| | 2.3.4. <i>Pause TV</i> | 40 |
| | 2.3.5. <i>Video on Demand</i> | 40 |
| | 2.3.6. <i>Music on Demand</i> | 41 |
| | 2.3.7. <i>Gaming</i> | 41 |
| | 2.3.8. <i>Interactive Advertisement</i> | 41 |
| | 2.3.9. <i>T-Commerce</i> | 42 |
| | 2.3.10. <i>News on Demand</i> | 42 |
| | 2.3.11. <i>Data on Demand</i> | 43 |
| | 2.3.12. <i>Pay per View</i> | 43 |
| 2.4 | RUANG LINGKUP LAYANAN IPTV | 45 |
| 2.5 | REGULASI IPTV DI BEBERAPA NEGARA DI DUNIA ... | 50 |
| | 2.5.1. <i>Regulasi di Australia</i> | 50 |
| | 2.5.2. <i>Regulasi di Perancis</i> | 51 |
| | 2.5.3. <i>Regulasi di Jerman</i> | 52 |
| | 2.5.4. <i>Regulasi di Hongaria</i> | 52 |
| | 2.5.5. <i>Regulasi di Jepang</i> | 53 |
| | 2.5.6. <i>Regulasi di Korea</i> | 54 |
| | 2.5.7. <i>Regulasi di Belanda</i> | 55 |
| | 2.5.8. <i>Regulasi di Inggris</i> | 55 |
| | 2.5.9. <i>Regulasi di Amerika Serikat</i> | 56 |
| 2.6 | IPTV DI INDONESIA | 59 |
| 2.7 | KONVERGENSI REGULASI TELEKOMUNIKASI DAN REGULASI PENYIARAN TERHADAP PENYELENGGARAAN IPTV DI INDONESIA | 64 |
| BAB 3 | KAJIAN REGULASI LAYANAN IPTV TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT LAINNYA | 74 |
| 3.1 | Analisis Hukum dalam Persaingan Usaha | 74 |
| | 3.1.1. <i>Posisi Dominan</i> | 74 |
| | 3.1.2. <i>Pembagian Wilayah</i> | 76 |
| | 3.1.3. <i>Blocking</i> | 78 |
| | 3.1.4. <i>Jual ikat (tying in sale)</i> | 78 |
| | 3.1.5. <i>Perjanjian Tertutup</i> | 79 |
| | 3.1.6. <i>Diskriminasi harga</i> | 79 |
| | 3.1.7. <i>Predatory pricing</i> | 79 |

| | |
|---|-----|
| 3.1.8. Kartel | 80 |
| 3.2 Analisis Hukum dalam Perlindungan Konsumen | 80 |
| 3.2.1. Tanggung Jawab Pelaku Usaha/ Penyelenggara | 80 |
| 3.2.2. Tanggung Jawab Produk | 83 |
| 3.2.3. Tanggung Jawab Konsumen/ Pelanggan | 86 |
| 3.2.4. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Periklanan | 88 |
| 3.2.5. Ketentuan Pencantuman Klausula Baku | 91 |
| 3.2.6. Pertanggungjawaban Hukum dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik | 92 |
| 3.3 Analisis Hukum dalam Hak Cipta | 94 |
| 3.3.1. Perlindungan terhadap Pencipta | 94 |
| 3.3.2. Perlindungan terhadap Kepentingan Umum | 97 |
| 3.3.3. Perlindungan Hak Ekonomis | 99 |
| 3.3.4. Perlindungan Hak Moral | 101 |
| 3.3.5. Perlindungan Konten | 103 |
| 3.3.5.1. Perlindungan terhadap Karya Rekaman Suara | 103 |
| 3.3.5.2. Perlindungan terhadap Karya Siaran | 107 |
| 3.4 Analisis Hukum dalam Pornografi | 116 |
| 3.4.1. Perbuatan Yang Dilarang | 118 |
| 3.4.2. Sanksi Hukum bagi yang memproduksi dan menyebarkan Pornografi | 119 |
| 3.4.3. Perlindungan Anak serta Peran Pemerintah dan Masyarakat | 121 |
| 3.5 Analisis Hukum dalam Perfilman | 122 |
| 3.5.1. Persaingan Usaha Tidak Sehat | 124 |
| 3.5.2. Film sebagai Kegiatan Ekonomi | 125 |
| 3.5.3. Perlindungan Hukum | 126 |
| 3.5.4. Pendidikan Film | 127 |
| 3.5.5. Pengaruh Investasi Asing | 127 |
| 3.6 Analisis Hukum dalam Transaksi Elektronik | 128 |
| 3.6.1. Transaksi Elektronik | 128 |
| 3.6.2. Perbuatan Yang Dilarang | 131 |
| 3.6.3. Penyidikan | 132 |
| 3.7 Analisis Hukum dalam <i>Cybercrime</i> | 135 |
| 3.7.1. Akses Ilegal | 137 |
| 3.7.2. Ilegal Intersepsi | 137 |
| 3.7.3. Konten Ilegal | 138 |
| 3.7.4. Data Interferensi | 138 |

| | |
|--|---------|
| 3.7.5. Sistem Interferensi | 139 |
| 3.7.6. Penyalahgunaan Perangkat | 139 |
| 3.7.7. Pemalsuan yang berkaitan dengan Komputer | 139 |
| 3.7.8. Penipuan yang berkaitan dengan Komputer | 140 |
| 3.7.9. Pelanggaran yang terkait dengan Hak Cipta dan Hak Terkait | 140 |
| 3.7.10. Intersepsi data isi | 141 |
| 3.7.11. Yurisdiksi | 141 |
| 3.7.12. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya <i>Cybercrime</i> | 142 |
| 3.7.13. Pencegahan terjadinya <i>Cybercrime</i> | 145 |
| BAB 4 KESIMPULAN DAN SARAN | 147 |
| 4.1 KESIMPULAN | 147 |
| 4.2 SARAN | 150 |
| DAFTAR PUSTAKA | 151 |
| I. BUKU | 151 |
| II. ARTIKEL DAN KARYA LEPAS | 153 |
| III. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN | 153 |
| IV. HASIL PENELITIAN | 155 |
| V. SUMBER LAIN DAN WEB SITE | 155 |

DAFTAR GAMBAR

| | | | |
|--------|------|--|-----|
| GAMBAR | 1.1. | KONVERGENSI TEKNOLOGI DAN BISNIS | 6 |
| GAMBAR | 1.2. | IPTV DIKIRIMKAN SECARA BROADCAST DAN VIDEO ON DEMAND SECARA UNICAST | 25 |
| GAMBAR | 2.2. | KONFIGURASI DASAR IPTV | 25 |
| GAMBAR | 3.2. | IMPLEMENTASI IPTV DI BEBERAPA NEGARA | 26 |
| GAMBAR | 4.2. | CARA KERJA IPTV SET TOP BOX | 27 |
| GAMBAR | 5.2. | SET TOP BOX IPTV | 28 |
| GAMBAR | 6.2. | SISTEM ARSITEKTUR JARINGAN TELEKOMUNIKASI | 30 |
| GAMBAR | 7.2. | SISTEM LAYANAN TELEVISI DIGITAL UNTUK MELAYANI KONSUMEN | 33 |
| GAMBAR | 8.2. | PENYEDIA LAYANAN TV DI INDONESIA | 45 |
| GAMBAR | 1.3. | JARINGAN IPTV DAN PUSAT PENYEDIA LAYANAN | 77 |
| GAMBAR | 2.3. | ARSITEKTUR PERLINDUNGAN KONTEN UNTUK IPTV | 113 |
| GAMBAR | 3.3. | TAHAPAN PERTAMA DARI PENDEKATAN BERTAHAP | 114 |
| GAMBAR | 4.3. | ARSITEKTUR PERANGKAT LUNAK CA CLIENT ... | 115 |
| GAMBAR | 5.3. | TAHAPAN KEDUA DARI PENDEKATAN BERTAHAP | 115 |

DAFTAR TABEL

| | | |
|-------|--|----|
| TABEL | 1.2. PERBANDINGAN TV ANALOG DAN TV DIGITAL | 20 |
| TABEL | 2.2. PERBANDINGAN IPTV DAN INTERNET TV | 23 |



DAFTAR LAMPIRAN

| | | | |
|----------|---|--|-----|
| LAMPIRAN | 1 | MASUKAN DAN TANYA JAWAB DALAM FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) RPM IPTV .. | 156 |
| LAMPIRAN | 2 | KARAKTERISTIK REGULASI IPTV DI BEBERAPA NEGARA DI DUNIA | 160 |

